



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 949/I/III/2017 • MARET 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



KUNJUNGAN RAJA SALMAN BABAK BARU HUBUNGAN RI - ARAB SAUDI

3 DPR RI BERIKAN
PELAYANAN TERBAIK
SAMBUT RAJA SALMAN

10 KOMISI IV DPR RI BERHARAP
GORONTALO JAGA
BIBIT LOKAL JAGUNG

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Kunjungan Raja Salman, Babak Baru Hubungan RI - Arab Saudi

Setelah hampir setengah abad, kini sejarah berulang kembali. DPR RI kembali mendapat kehormatan Raja Salman Bin Abdulaziz Al-Saud. Seperti diketahui, pada 47 tahun yang lalu, DPR RI gotong royong menerima kunjungan kehormatan Raja Faisal Bin Abdulaziz Al-Saud di Gedung DPR RI.

“Atas nama seluruh anggota DPR RI dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat datang di Indonesia. Ahlan Wa Sahlan Marhaban Fi Indonesia. kunjungan kehormatan Yang Mulia ke Indonesia, menandai babak baru hubungan Arab Saudi dan Indonesia, karena tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintahan, melainkan juga terjalin hubungan persaudaraan yang sangat erat antara Sri Baginda raja dengan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam,” ucap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sambutannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/03).

Setya Novanto menyatakan, atas nama rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, ia menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kemurahan hati Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman Bin Abdulaziz Al-Saud yang telah memulihkan kuota haji Indonesia sebesar 211.000 jemaah, serta tambahan kuota 10.000 jemaah pada musim haji 2017. Sehingga seluruhnya berjumlah 221.000 jemaah.

"Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, penambahan kuota tersebut sangat berarti bagi rakyat Indonesia. Apalagi animo umat Islam untuk berhaji sangatlah tinggi, sementara kuota yang tersedia begitu



Raja Salman menandatangani piagam kunjungan

terbatas. Kami mohon, Kerajaan Arab Saudi dapat memberikan tambahan kuota yang lebih besar lagi, sebagai wujud persaudaraan dengan rakyat Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Setnov itu.

Menurut Setnov, kedua negara mempunyai pandangan dan sikap yang sama dalam menghadapi ancaman komunisme dan zionisme. Ancaman yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dari bahaya terorisme dan radikalisme.

"Jika Indonesia dan Arab Saudi dapat bekerjasama dan bersatu padu, maka akan

memberikan dampak yang besar dalam menciptakan perdamaian dunia, setidaknya dikalangan negara-negara Islam. Di situlah poros Saunesia atau Saudi Arabia-Indonesia perlu kita mantapkan ke depan," tandasnya.

Setnov juga mengatakan, Indonesia menyambut baik visi 2030 Arab Saudi, yang ingin mengembangkan investasi secara besar-besaran dikawasan asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dengan kondisi stabilitas politik dan keamanan yang ada, Indonesia dapat dijadikan tujuan investasi yang sangat menjanjikan.

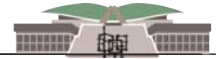
"DPR RI menyambut baik dan mendukung penuh penandatanganan 11 MOU yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, dengan nilai sekitar 25 miliar dolar AS atau setara dengan 325 triliun rupiah. Kami juga berharap agar masalah Tenaga Kerja Indonesia dapat dicarikan solusi yang terbaik" tegas politisi Golkar tersebut.

Sementara itu Raja Salman bin AbdulAziz Al Saud mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap dirinya dan rombongan. " Terima kasih atas sambutan luar biasa penuh kehormatan. Semoga ini menjadi titik kerja sama di berbagai aspek di tengah dinamika umat Islam," katanya.

Raja Penjaga dua kota Suci itu juga berbicara soal kerja sama antar dua negara yang berfokus pada pemberantasan terorisme. Selain itu, fokus kerja sama juga menyangkut masalah politik. Persoalan kerja sama pemberantasan terorisme menjadi persoalan bersama," ia menambahkan.

Usai berpidato, Raja Salman berfoto bersama dengan Pimpinan DPR RI dan juga dengan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono serta mantan Wapres Tri Sutrisno. ■

(dep.rmp) foto: tim parle/rmr



DPR RI Berikan Pelayanan Terbaik Sambut Raja Salman

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Setya Novanto melakukan pengecekan kembali di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Senin (27/02) untuk memastikan persiapan sarana dan prasarana menyambut kedatangan, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dalam rangkaian lawatannya ke Indonesia 2 hingga 9 Maret 2017.



Ketua DPR RI Setya Novanto saat pengecekan sarana dan prasarana ruang paripurna

Menurut Ketua DPR RI yang akrab dipanggil Setnov menyatakan, target persiapan sudah mencapai 90 persen pengerjaan dan di pastikan hari Rabu (1/3) lusa akan selesai," ungkapnya.

Dalam rangka menyambut Raja dari Arab Saudi itu, kata Setnov, DPR RI akan memberikan kenyamanan sebaik mungkin dalam kunjungannya, mulai turun mobil, sampai menuju ruang sidang.

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya sudah siap dan sudah menghitung lama perjalanan mengingat fisik Raja yang sudah lanjut. Karena itu diperlukan kehati-hatian dalam mengatur waktu dan jalannya acara agar semuanya tidak terganggu.

Raja Salman dijadwalkan akan

memberikan pidato di depan para Anggota Dewan pada Kamis yang akan datang (02/03). "Momen ini juga mengulang sejarah 47 tahun lalu dimana Raja Faisal bin Abdulaziz As Saud menyampaikan pidato di DPR RI. Jadi kita hormati betul-betul, suasana kenyamanan," ujar Ketua Umum Golkar itu.

Dia menambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling besar dalam pengiriman Haji maupun Umroh. Tidak hanya itu, Dalam acara ini DPR RI juga mengundang ulama Islam dan tokoh-tokoh. PBNU, MUI, Muhammadiyah, dan ormas lainnya guna bisa bersama-sama menyambut dan menyaksikan langsung kehadiran Raja Salman. ■

(my.mp).totorum/hr.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Irandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

STAFF PRODUKSI

Subadri, S.E, Mujiono, Barliansyah, Fathurahman

SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiayah,

Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Indonesia Miliki Daya Tarik bagi Pemerintah Arab Saudi

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia adalah kunjungan bersejarah, setelah 46 tahun yang lalu kunjungan pemerintah Arab Saudi, Raja Faisal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik dan daya pikat bagi Pemerintah Arab Saudi.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia adalah negara potensial. Bukan hanya dari perspektif budaya, tapi juga sosial, politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. "Menurut saya, posisi itulah yang seharusnya bisa kita manfaatkan demi kepentingan Indonesia dan peraturannya di tingkat global, khususnya dengan negara-negara besar dan maju, seperti Arab Saudi," kata Taufik dalam pernyataan persnya Rabu (01/03).

Menurut Pimpinan DPR RI bidang Korekku ini, kunjungan Raja Salman ini



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan

memang telah dipersiapkan sebelumnya. Awal tahun ini saja, Presiden serta DPR RI telah menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, Ibrahim Al-Syeikh. DPR RI juga menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Mohammed Alshuibi.

Banyak hal yang dibicarakan dalam rangkaian tersebut, selain persiapan

kunjungan Raja Salman. Selain itu ada beberapa hal penting yang menyangkut kepentingan kerja sama kedua belah pihak. Diantara perjanjian kerja sama investasi.

" Kita tahu, ini adalah kesempatan penting dalam perspektif ekonomi. Arab Saudi sudah mewacanakan kerja sama investasi tersebut sebelumnya dengan nilai kerja sama yang hampir mencapai 300 triliun. Kerja sama ini tentu sangat menguntungkan, karena potensi investasi di Indonesia begitu besar," ungkap Taufik dengan menambahkan, pada saat yang sama Presiden Joko Widodo memang sedang menggalakkan aspek tersebut demi menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

Selain itu, tentang kerja sama tenaga kerja. Kita juga tahu, jutaan Tenaga Kerja Indonesia sedang mencari nafkah di Arab Saudi. Hal ini tentu menguntungkan kedua belah pihak. Meski demikian, berbagai persoalan yang menyangkut keberadaan TKI di Arab Saudi harus memperoleh perhatian, khususnya aspek keamanan, perlindungan dan kesejahteraan," jelasnya. ■

(mp) foto : rodit/rmr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkeksra Fahri Hamzah

Kehadiran Raja Salman Diharapkan Pererat Hubungan Kedua Negara dan Semakin Produktif

Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis ke DPR RI beserta rombongan diharapkan bisa mempererat hubungan antara Indonesia-Arab Saudi semakin produktif di masa depan.

Sepeerti halnya 47 tahun lalu Raja Faisal bin Abdulazis As Saud menyampaikan pidato di depan sejumlah tamu yang hadir "siapa yang mengingkari hubungan ini antara Saudi dan Indonesia seperti mengingkari matahari di siang bolong,"

"Kalimat itu saya kira luar biasa," ujar Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah usai melakukan pengecekan kesiapan kedatangan Raja Salman di Loby Nusantara, Gedung DPR RI, Selasa, (28/02).

Lebihlanjut Fahri Hamzah mengapresiasi

pemerintah Indonesia yang sudah memfasilitasi kerjasama dengan Arab Saudi dengan ditandatangani *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Luar Negeri, Kedubes Indonesia dan Kedubes Saudi Arabia.

Pimpinan DPR RI bidang Korkesra ini menepis kedatangan Raja Salman disebabkan roda perekonomian di Arab sedang goyang. "Arab Saudi sangat kuat perekonomiannya dan tidak memungkinkan goyang, karena perharinya di Arab memompa 12 juta barel,

dan menjual belasan juta barel minyak," jelasnya.

Dijelaskan Fahri, dalam acara tersebut sejumlah undangan akan hadir sebanyak 1.400-1.500 orang untuk menyaksikan langsung pidato orang nomor satu di Kerajaan Saudi Arabia. Seperti para Anggota DPR RI, DPD, tokoh-tokoh agama dan ormas, jurnalis, rektor Universitas Islam serta Persatuan Isteri Anggota (PIA) DPR RI. Selain itu mantan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi. ■

fm.mp/lebc:rodh/rr

Kunjungan Raja Salman, Momentum Penting Peningkatan Hubungan Ekonomi

Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz beserta 1500 rombongan ke Indonesia pada bulan Maret ini, mengundang perhatian luas dari berbagai elemen, baik di dalam maupun luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon memandang kunjungan Raja Salman ke Indonesia sebagai sebuah peristiwa diplomatik penting bagi peningkatan hubungan kedua negara, baik secara politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/02) Fadli Zon melihat kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam 47 tahun terakhir ini, membawa misi diplomasi ekonomi yang sangat positif bagi Indonesia. "Kita tahu bahwa sejak 2016 Arab Saudi giat melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sektor migas. Salah satunya yakni dengan aktif melakukan kerjasama investasi," tegasnya.

Di tengah hubungan yang kurang hangat dengan negara-negara barat, yang dipicu oleh kebijakan diskriminatif AS terhadap negara timur tengah, Asia menjadi pilihan destinasi utama bagi investasi Arab Saudi. Itulah mengapa Arab Saudi agresif melakukan pendekatan investasi ke China, Jepang, Malaysia, dan juga Indonesia. "



Pimpinan DPR RI

Peluang ini harus kita tangkap untuk kepentingan nasional kita," jelas Pimpinan DPR RI Korpolkam ini.

Dalam konteks tersebut, Fadli Zon juga melihat Indonesia memiliki posisi khusus di mata Arab Saudi. Selain karena Asia, Indonesia juga merupakan negara muslim anggota G20 bersama Arab Saudi dan Turki. Kondisi ini yang membuat Indonesia semakin strategis bagi investasi Arab Saudi.

Politisi Gerindra ini sangat berharap agar momentum kunjungan Raja Salman ini benar-benar dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendetailkan semua agenda kerjasama ekonomi yang akan dijalin. Sebab kita tahu

b a h w a sebelumnya kedua negara juga sudah melakukan perbincangan intensif sejak 2015 tentang rencana mega investasi Arab Saudi di Indonesia. Baik itu di bidang energi, perumahan murah dan pariwisata. S e h i n g g a , pertemuan kedua negara nanti harus lebih fokus pada

hal-hal konkrit. Jangan sampai kerjasama berhenti pada MoU saja, tapi tak ada realisasi. "Kita harus tahu apa yang kita inginkan dari Arab Saudi," ia menegaskan.

Pertemuan kali ini, tambah Fadli, harus ada bobot lebih. Jangan sampai berakhir seremonial saja. Meski akan fokus pada isu ekonomi, ia melihat momen ini juga penting untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia, serta perlindungan TKI di Arab Saudi. " Pemerintah harus memastikan situasi kondusif dari ancaman keamanan atau bentuk gangguan lainnya," pungkasnya. ■

(mp).Foto: lqba/rr



Suasana pelantikan tiga anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Periode 2014 - 2019

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon, Pimpinan DPR RI melantik H. Mardani menggantikan H. Sa'duddin dari F-PKS daerah pemilihan Jawa Barat VII, Nawafie Saleh menggantikan Airlangga Hartarto dari F-Golongan Karya daerah pemilihan Jawa Barat V dan Tutik Kusuma Wardhani menggantikan Jero Wacik dari F-Demokrat daerah pemilihan Bali.

Pengucapan sumpah janji kedua anggota PAW

Sa'duddin dan Nawafie Saleh dipandu langsung Ketua DPR RI Setya Novanto, sementara anggota PAW Tutik Kusuma Wardhani dipandu Pelaksana Harian (Plh) Mahkamah Agung. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ucap Novanto diikuti Anggota Dewan yang dilantik tersebut.

Setelah pembacaan sumpah selesai, pimpinan DPR RI secara bergantian memberikan salam tanda ucapan selamat kepada ketiga Anggota Dewan PAW periode 2014-2019. ■

(fem/soj) : foto:rumah/w.

Pimpinan DPR RI Lantik 3 Anggota PAW

Pimpinan DPR RI melantik tiga anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Periode 2014 - 2019 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016 - 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/02).

DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU



Ketua DPR RI Setya Novanto saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III tahun 2016-2017

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III tahun 2016-2017 telah menyepakati perpanjangan beberapa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini sedang dalam tahap pembahasan di DPR RI. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon Kamis, (22/02), seluruh anggota yang hadir dalam rapat tersebut setuju untuk dilakukan perpanjangan waktu.

Beberapa RUU yang mengalami perpanjangan waktu pembahasan yakni RUU Sistem Perbukuan, RUU Kebudayaan, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pendapatan Negara Bukan Pajak, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan RUU Arsitek.

"Apakah dapat disetujui perpanjangannya?" tanya Fadli Zon. "Setuju," jawab seluruh hadirin di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menanggapi disetujuinya masa perpanjangan waktu terhadap enam RUU tersebut, Anggota Komisi VI Aria Bima mengatakan bahwa diperlukan koordinasi intensif antara Pimpinan DPR RI terhadap AKD terkait agar pembahasan RUU dapat segera dirampungkan.

"Tapi kami mohon untuk lebih memperhatikan hal khusus terkait tugas legislatif kita. Baik hal terkait yang dibahas pansus besar dan komisi. Mohon ada koordinasi yang intensif soal target pembahasan pansus," jelas Aria Bima.

Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, bahwa diperlukan juga adanya kesepakatan waktu yang pasti agar RUU yang dibahas di DPR RI dapat diselesaikan.

"Perlu ada aksentuasi dari aspek waktu. Kalau perlu dalam masa ada kesepakatan," jelas Aria Bima. ■

(fhs)ci/fotografi/wk

Ketua DPR RI Apresiasi Kerja Cepat Polri Tangani Bom Panci Bandung

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan, mendapatkan kabar adanya aksi terorisme, dimana seorang tersangka teroris meletakan sebuah bom yang dikemas seperti panci disekitar kantor kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Bandung Jawa Barat.

“ Saya meng-
apresiasi kerja
cepat dan tanggap
petugas keamanan
dalam hal ini Polri, yang
senantiasa siap siaga 24
jam dalam menjamin
rasa aman kita dari
berbagai kekhawatiran
yang setiap saat
mengintai, seperti saat
menangani aksi teroris
di Jawa Barat ini.
Petugas Kepolisian kita
seolah tidak pernah tidur
untuk menjaga situasi



Ketua DPR RI Setya Novanto

dan kondisi serta aktivitas Rakyat Indonesia agar tetap berjalan baik, lancar, tenang dan damai," katanya dalam keterangan persnya Senin (27/02) sore di Jakarta.

Bahkan kata Ketua DPR RI, dirinya melihat Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton berada tempat kejadian perkara memimpin langsung penanganan aksi teroris ini.

Lebih lanjut Setnov menyatakan, dirinya dan kita semua sangat menyayangkan ulah segelintir orang yang seolah tidak pernah puas memberi rasa cemas mengancam kehidupan warga negara khususnya Rakyat Indonesia, dengan cara-cara yang tidak benar, tidak simpatik dan tidak berperikemanusiaan.

" Kita semua harus tetap waspada, sebagaimana imbauan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian yang menyatakan bahwa potensi dan ancaman bom masih berkeliaran di sekitar kita yang mungkin ada di sekitar kita, tanpa dapat disangka dan duga," tegasnya.

Untuk itu Pimpinan Dewan dari FPG ini mengingatkan kepada kita semua agar

segera melaporkan ke petugas kepolisian jika melihat orang-orang atau kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.

Selain itu, kembali dia mengingatkan untuk menjalankan komitmen nasional, komitmen sebagai anak bangsa yang menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman perpecahan dan ancaman pemahaman radikal.

Menurutnya, radikalisme memasuki dan mengintai setiap sendi masyarakat yang rapuh akan paham kemanusiaan, goyah akan pentingnya persatuan dan kesatuan serta kebhinnekaan, sehingga wajib bagi kita untuk selalu ingat dan mengingatkan atas komitmen tersebut.

"Kita harus menunjukkan kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita, kepada generasi masa depan bahwa radikalisme adalah ancaman nyata dan serius sehingga harus dilawan oleh seluruh komponen bangsa dengan seluruh sumber daya yang kita miliki," demikian Setya Novanto. ■

(mp) foto : rodhly/mr

Israel Dituntut Segera Patuhi Resolusi PBB Untuk Palestina

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto mendesak Parlemen dapat mengambil peran lebih dengan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menekan Israel lebih keras untuk tunduk dan patuh terhadap Resolusi Nomor 2334 yang disetujui pada tanggal 23 Desember 2016. Resolusi ini mendesak diakhirinya pemukiman Israel, komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang direbutnya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

Agus menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai program nyata untuk mendukung Palestina antara lain memberikan pelatihan teknis bagi aparaturnya sampai tahun 2019 dan membangun Rumah Sakit di Jalur Gaza yang mulai beroperasi sejak 27 Desember 2015.

"Namun, dukungan dan tindakan konkrit masih diperlukan khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur," jelasnya saat menghadiri *The 6th International Conference for Supporting the People of Palestine* di Teheran, Republik Islam Iran, 21-22 Februari 2017. Konferensi tersebut bertajuk *All Together for Palestine* tersebut dihadiri lebih dari 700 peserta dari 80 negara.

Dia menjelaskan, pada 13 Maret 2016, Pemerintah Indonesia juga telah melantik Konsul Kehormatan Pertama Indonesia di Palestina. selain itu, DPR RI telah membentuk Kaukus Palestina dan Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Palestina.

Agus mengatakan, perhatian Indonesia terhadap masalah Palestina juga ditunjukkan dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkait Palestina di Jakarta pada Maret 2016.

Pada konferensi yang merupakan agenda rutin Parlemen Iran tersebut, Agus menyinggung pelanggaran yang kerap kali melanggar hukum-hukum internasional termasuk yang paling baru Resolusi PBB 2334 Tahun 2016 yang mendesak Israel



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto

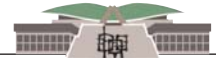
menghentikan permukiman ilegal Israel.

Agus mengingatkan ratusan peserta konferensi ihwal urgensi persatuan antara negara-negara Islam khususnya faksi-faksi pejuang Palestina termasuk Hamas dan Fatah. "Saya ingin menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara kita. Hal ini termasuk rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina terutama Fatah dan Hamas. Marilah kita wujudkan *All together for Palestine*," paparnya.

Wakil Ketua DPR RI bidang korinbang menambahkan, bahwa Indonesia, baik sebagai pemerintah, parlemen, ataupun masyarakat, telah dan terus memainkan kontribusi nyata untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. ■

(6). Foto : dok.BK/SAP/mr





Kejati Lampung Diharapkan Pertahankan Pendidikan Kesadaran Hukum

Anggota Komisi III DPR RI TB Soenmandjaja mengapresiasi langkah proaktif Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan kesadaran hukum. Kesadaran hidup dalam negara hukum menurutnya adalah pembinaan moral mental dan spiritual, diharapkan kinerja baik ini dipertahankan.



Anggota Komisi III DPR RI Tb. Soenmandjaja

“Apresiasi kepada Jaksa yang proaktif sosialisasi ke sekolah, ke kampus dan ke masyarakat,” ujar Soenmandjaja, usai berdialog dengan jajaran Kejati Lampung, di Kantor Kejati, Selasa (28/02).

Pendidikan kesadaran hukum yang diberikan Kejati Lampung kepada lembaga

pendidikan di provinsi ini disesuaikan dengan levelnya. Sekolah tingkat dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi tentu mutan materi yang diberikan berbeda tergantung kebutuhan.

“Apakah dia SD atau SMP, SMA, atau Perguruan Tinggi. Bahkan ada beberapa undang-undang yang perlu mereka ketahui,” ungkap Soenmandjaja.

Dia menegaskan intinya adalah pembinaan moral dan spiritual guna kedisiplinan dan kesadaran hukum pada masyarakat. “Lebih pada pembinaan moral, mental dan spiritual untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran hukum,” jelas politisi dari F PKS.

Berkaitan dengan performa kinerja secara umum dia memberikan respon yang positif, namun dia mengimbau agar juga memberikan penyuluhan tentang undang-undang kepada para aparat desa.

“Saya juga mengimbau tadi agar proaktif memberikan pencerahan tentang hukum kepada kepala-kepala desa dan aparat desa, berkenaan dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” harapnya.

Saat berdialog dengan jajaran Kejati, dia mengungkapkan, yang dilaporkan baru sebatas lisan dan laporan tertulis, tapi belum diverifikasi secara teliti. Meskipun demikian Soenmandjaja mencoba berbaik sangka pada kinerja Kejati Lampung, tapi dia meminta pada Kejati agar memelihara kinerja dan meningkatkan inovasi. ■

(eko.mpi). Foto: eko/jk

Komisi VIII DPR RI Dorong Kemensos Bantu UKM Gorontalo

Komisi VIII DPR RI mendorong Kemensos agar membantu sejumlah UKM di Provinsi Gorontalo. Ini penting untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak Tinjau UKM Gorontalo

“Delegasi Komisi VIII yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo, menyempatkan diri mengunjungi Kelompok Usaha Mahakarya Gorden, Selasa (28/2), yang ditukangi para ibu setempat. Kelompok ini membawahi puluhan unit usaha lainnya di Gorontalo. Butuh suntikan modal bagi kelompok usaha yang baru dibangun tiga tahun ini untuk kemudian diharapkan bisa mandiri.

Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak menyatakan, Kemensos perlu membantu modal usaha sebesar Rp50 juta per kelompok usaha di setiap provinsi. Dana bantuan ini perlu diberikan dengan selektivitas yang tinggi. Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq juga menyarankan agar ada **pilot project** untuk setiap kelompok usaha yang berhasil di setiap provinsi.

Sementara itu, Ketua Kelompok Usaha Mahakarya menjelaskan, usaha gorden yang dirintisnya baru menghasilkan omzet Rp10 juta per bulan. Kini, mereka juga sedang merambah usaha pembuatan kue kering. Untuk itu, butuh mesin **oven** untuk pengolahan kue yang selama ini belum mereka miliki. Kemensos perlu memberi perhatian khusus untuk ini. ■

(mp). Foto: husen/hr

Komisi IV DPR RI Berharap Gorontalo Jaga Bibit Lokal Jagung

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo berharap bibit lokal jagung yang merupakan produk asli daerah Gorontalo dijaga dan jangan dihilangkan. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara panen raya jagung di Desa Tridarma, Pulubala, Provinsi Gorontalo, Selasa (28/02).

“ Hari ini kami menjadi saksi dari sebuah *success story*. Dari ratusan kabupaten, namun di Kabupaten Gorontalo inilah yang berhasil melakukan swasembada jagung. Terbukti dengan hasil panen raya yang saat ini kami lihat bersama menghasilkan 10 ton jagung untuk satu hektarnya,” ujar Edhy.

Meski demikian politisi dari fraksi Partai Gerinda ini berharap agar Gorontalo menjaga bibit lokal asli daerah tersebut yang terkenal dengan kualitasnya yang cukup baik. Mengingat berkembangnya perekonomian daerah Gorontalo salah

satunya berasal dari tanaman jagungnya.

Tingginya jumlah jagung yang dihasilkan itu menurut Edhy juga berpotensi untuk meningkatkan sektor peternakan di Gorontalo. Khususnya dalam bidang penggemukan sapi. Karena ketersediaan pangan ternak terbilang cukup banyak, wilayah dan SDM untuk melakukan hal tersebut pun sangat memungkinkan.

"Menurut Bupati, Pak Nelson, daerahnya cukup berpotensi untuk melakukan penggemukan sapi hingga 1 juta ekor. Namun saat ini masih berada di angka 83 ribu. Pangan

ada, wilayah ada, SDM pun ada. Namun masih kurang jumlah bibit ternaknya. Saya berharap potensi ini dapat segera dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh kementerian dan dinas terkait," pungkasnya.

Dalam panen raya itu selain didampingi oleh Bupati Gorontalo utara, Edhy juga didampingi oleh Anggota Komisi IV lainnya seperti Ono Surono, Dardiansyah, Ibnu Munzir, Endro Hermono, M. Nasyit Umar, Kasriyah, Sulaeman L Hamzah, Rahmad Handoyo, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, dan Susi Syahdonna M Baschin. ■

(Ayu) foto : Ayu/mr.



Tito Runkor Komisi IV DPR RI ikut panen raya jagung di Gorontalo

DPR RI Dorong Peningkatan Sarpras Pendidikan di Lampung Timur

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lampung Timur, (Lamtim) Provinsi Lampung, dinilai masih minim dan memprihatinkan. Bahkan, beberapa sekolah memiliki fasilitas yang tidak lengkap. Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta adanya perhatian Pemerintah Pusat, dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana di Lamtim.



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMPN 2 Batanghari Nuban, Lampung Timur

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Hendra saat memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Lampung, khususnya saat meninjau beberapa sekolah di Lamtim, Senin (27/02). Sekolah yang didatangi Tim Kunker Komisi X diantaranya SD Negeri 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, dan SMA Negeri 1 Sukadana. Dalam kunjungan ini, Komisi X didampingi langsung Bupati Lamtim, Chusnunia Chalim.

"Setelah kami mengunjungi beberapa sekolah, baik di SD, SMP dan SMA, kita melihat beberapa sarana dan prasarana yang masih sangat membutuhkan perhatian. Komisi X akan mendorong sarana dan prasarana, terutama dalam bentuk infrastrukturnya, agar kedepannya ini bisa lebih baik, sehingga kenyamanan anak-

anak dalam belajar bisa lebih baik," kata Sutan

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, setelah mengunjungi SDN 1 Tulus Rejo, pihaknya mendapat laporan bahwa sekolah yang dibangun pada tahun 1960 itu tidak pernah direnovasi, bahkan mendapat kelas baru. Untuk itu, ia meminta perlu adanya Ruang Kelas Baru (RKB). Termasuk di SMPN 2 Batanghari Nuban, pihaknya melihat masih perlu adanya perbaikan-perbaikan. Bahkan di SMAN 1 Sukadana, Komisi X

menemukan laboratorium komputer yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, sehingga ruangan Nampak tak terawat dan peralatan yang tak berfungsi.

"Kami melihat suasana ini butuh perbaikan-perbaikan agar siswa semangat dalam belajar. Sehingga kedepannya, kami berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di Lamtim bisa bersaing dengan daerah lain," imbuh Sutan.

Terkait kondisi sarana dan prasarana ini, Komisi X mendorong Pemkab Lamtim untuk memiliki data pokok pendidikan (dapodik) yang baik. Pasalnya, dapodik ini menjadi salah satu acuan yang akan menjadi Pemerintah Pusat.

"Kami juga akan coba lihat, bagaimana neraca pendidikan, apakah selama ini telah ada perimbangan di Kabupaten Lamtim. Sehingga ada sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat," tambah Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini juga mengapresiasi langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan Bupati Lamtim Chusnunia. Apalagi, sebelum Chusnunia terpilih menjadi Bupati Lamtim, merupakan Anggota Komisi X DPR RI.

"Ini merupakan kecerdasan Bupati, bagaimana menata Kabupaten ini ke depan, dengan menata SDM. Jadi, kami akan terus melakukan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana, sehingga ke depannya tercipta keadilan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia," tutup Sutan. ■



(sf) foto: sofyar/nr.



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat tinjau Konservasi Mangrove Brebes Jateng

Pemerintah Diminta Kembangkan Potensi Wisata Konservasi Mangrove Brebes

Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Konservasi Mangrove Pandansari Desa Kaliwlingi, Brebes. Ia melihat dukungan Pemerintah terhadap wilayah Konservasi Mangrove tersebut kurang dan selama ini Pemerintah hanya mengandalkan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mashadi pegiat kelompok desa sadar wisata Pandansari Brebes berharap Pemerintah bisa mempermudah kebijakan-kebijakan yang mendukung program masyarakat sekitar. Terutama terkait keterbatasan teknologi yang ramah lingkungan.

"Kami berharap bisa didukung dengan kekurangan-kekurangan lain yang nantinya bisa kami kembangkan. Karena mimpi kami desa ini menjadi tempat wisata. Berkarya tidak harus bergantung pada negara. Kuncinya yakin dengan usaha yang dilakukan selama ini dan kami bersyukur apa yang kami tanam selama ini bisa menjadi potensi pariwisata." jelasnya.

Ikut serta Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Esti Wijayati, Sofyan Tan dan Irine Yusiana (F-PDI Perjuangan), Ridwan Hisyam (F-PG), Nuroji (F-Gerindra), Laila Istiana (F-PAN), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Anas Thahir (F-PPP), dan Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem). ■

(ira.mp) foto:tiara/mr.

“ Pemerintah sebaiknya turut hadir mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Jika masyarakat diedukasi dengan baik tentunya akan mengundang bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan asing untuk datang," kata Fikri di sela-sela rangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Brebes, Jawa Tengah, Minggu (26/02).

Politisi asal dapil Jateng itu mengatakan, hutan mangrove di Pandansari jika dikelola dengan baik tidak kalah dengan destinasi wisata yang ada di Phuket Thailand.

"Agar tidak kalah, maka dari itu kita harus memulai *branding*, *advertising* dan *selling*. Tapi tentunya ini harus ada dukungan dan sentuhan dari Pemerintah," ucapnya dengan menambahkan bahwa kawasan Konservasi Mangrove memiliki potensi-potensi alam yang luar biasa.

" Ternyata dengan mangrove selain mencegah terjadinya abrasi, juga mengundang fauna kecil seperti ikan, kepiting dan lain-lain untuk datang yang pada akhirnya juga mengundang para ikan besar sehingga nelayan tidak lagi kesulitan mencari ikan," kata Fikri.



PIA Gelar Talkshow Menyikapi Datangnya Pre Menopause dengan Bahagia

Menopause kerap menjadi momok yang menakutkan bagi seorang wanita. Untuk menghadapi datangnya masa itu perlu berbagai persiapan. Oleh karena itulah Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menggelar *talkshow* bertajuk "Menyikapi Datangnya Pre-Menopause dengan Bahagia" di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Kamis (23/02).

“ Menopause merupakan fase alami yang pasti dialami setiap wanita, namun bagi wanita terkadang masih menjadi momok yang menakutkan. Ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis seorang wanita, yang pada akhirnya ikut mempengaruhi pasangan. Oleh karena itulah perlu



Foto Bersama Peserta *talkshow* PIA DPR RI tema Menyikapi Datangnya Pre-Menopause

persiapan dini bagi wanita untuk bisa menghadapi semua itu. Atas dasar itulah PIA DPR RI menyelenggarakan *talkshow* ini, untuk membantu memberikan pengetahuan atau edukasi kepada anggota PIA dan seluruh peserta yang ada di lingkungan DPR RI sehingga dapat menjalani masa tersebut dengan bahagia dan rumah tanggapun tetap dapat berjalan harmonis," jelas Ketua Umum PIA DPR RI Deisti A. Novanto.

Ditambahkan Ketua Panitia acara

Talkshow Lina Tampubolon, pihaknya sengaja mengambil tema tersebut mengingat masa-masa sebelum menopause wanita kerap mengalami *mood* yang kurang bagus. Padahal sebagai isteri anggota DPR RI sekaligus ibu rumah tangga dengan berbagai kegiatan, anggota PIA sejatinya butuh kondisi psikologis dan fisik yang baik untuk menjalani semua itu. Dengan *talkshow* ini diharapkan anggota PIA dapat sebuah pengetahuan bagaimana menyikapi datangnya masa

menopause, saat mengalami menopause dan pasca menopause.

Sementara itu dokter Boyke Dian Nugraha sebagai narasumber menjelaskan bahwa hal yang alamiah dan wajar jika wanita mengalami masa menopause. Meskipun masa itu sejatinya bisa ditunda hingga beberapa tahun kemudian, namun tetap harus ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyongsong datangnya masa menopause.

"Masa menopause terhadap wanita berbeda-beda namun secara umum berkisar antara usia 45-55 tahun. Pada kondisi ini wanita terkena kanker serviks atau kanker leher rahim tingkat risikonya tiga kali lebih besar dibanding wanita sebelum menopause. Meski demikian hendaknya hal ini tidak dijadikan sebagai momok yang menakutkan, jika siap untuk menjalaninya," jelas Boyke.

Apa saja persiapan itu, lanjutnya, yakni lewat kondisi tubuh yang sehat dan prima. Hal itu bisa didapat melalui asupan gizi yang cukup, olahraga dan paparan sinar matahari yang cukup. Kondisi tubuh yang sehat akan ikut mempengaruhi kondisi psikologis menjadi lebih percaya diri dihadapan pasangan.

Dijelaskannya juga, sejatinya tidak hanya wanita yang mengalami masa menopause, pria pun juga mengalami masa penurunan kesuburan yang dinamakan andropause. Hal itu ditandai dengan berkurangnya hasrat seksualnya. Dengan sama-sama menyadari kondisi tersebut diharapkan setiap pasangan dapat saling memaklumi satu sama lainnya, sehingga tidak mengurangi keromantisan dan tetap dapat hidup harmonis bersama pasangan hingga akhir hayat. ■

Persoalan Tanah di Kabupaten Badung Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung Provinsi Bali mengatakan, Kabupaten Badung merupakan primadona pariwisata, dimana tentunya *value* atas harga tanah mengalami peningkatan yang luar biasa.

Namun, di tengah tingginya *value* atas tanah dan permintaan untuk pengembangan, *land Register* di Kabupaten Badung belum sepenuhnya dilakukan, padahal dimulai dari hal tersebutlah Konflik Pertanahan mulai muncul.

"Antara tuntutan kebutuhan akan *value* tanah yang tinggi dan kemudian *land register* yang belum terselesaikan 100%, maka kita akan dorong Kementerian Agraria untuk segera menyelesaikan daerah tertentu, misalnya sekarang Badung sudah mulai ada 40-50 kasus sengketa tanah, baik yang masuk pengadilan maupun yang tidak masuk pengadilan," katanya saat memimpin Tim Kunker Komisi II Senin (27/02) lalu di Badung, Bali.

Selanjutnya, kata Fandi, daerah lain contohnya di Danau Toba jika mulai dikembangkan maka akan punya kesempatan yang sama dengan Badung. "Kalau kita punya prioritas nasional itu sampai tahun 2025 untuk menyelesaikan seluruh *land register* secara nasional, maka kita akan dorong dengan pendekatan prioritas," papar dia.

Menurutnya, pendekatan secara prioritas dibutuhkan agar daerah-daerah yang memiliki kasus sengketa tanah dapat memiliki prioritas. Daerah/desa/kabupaten/kecamatan mana yang harus didahulukan untuk selesai, sambil melakukan pendekatan pengusulan

tanah sistematis lengkap (PTSL) yang mulai di SK kan oleh Kementerian Agraria dan dilaksanakan mulai tahun ini.

Senada dengan Fandi Utomo, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rufinus Hotmaulana Hutaaruk mengatakan, inti dari setiap persoalan sengketa tanah tidak terlepas dari kurang atau belum adanya secara lengkap *land register*. Terkait dengan tata kelola ruang, menurut Rufinus hal tersebut juga masih tumpang tindih.

"Berkaitan dengan hal itu sebenarnya yang memperkeruh persoalan adalah, adanya putusan-putusan pengadilan yang tumpang tindih terhadap satu objek persoalan, ada putusan TUN terhadap objek yang satu, ada putusan perdata, pidana dimana ini tumpang tindih. Nah ini memang perlu pembenahan secara yuridikasi. Jadi kami dengan Komisi III memanggil MA untuk bisa membicarakan masalah ini, supaya tidak terjadi lagi," ucap Rufinus menambahkan.

Politisi Hanura ini juga mengatakan, dalam k o n t e k s R U U

Pertanahan, Komisi II DPR RI akan membangun sistem peradilan pertanahan yang beradab, dimana hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus sengketa tanah maupun tata kelola ruang.

Menurut dia, kasus-kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan di Kabupaten Badung ada sekitar 40 kasus. Itu ada teridentifikasi ambang batas, kemudian kepemilikan yang tidak jelas. Dan dari persoalan tata kelola ruang juga ada persoalan masa taruhan kemudian despite antara mana lahan pariwisata, industri dan pertanian. Hal itu juga belum jelas, mengingat tata ruang di Kabupaten Badung juga masih perlu perbaikan. ■

(ndy/mp) foto : Nadya/jk



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo

Penerapan Konsep *Smart City* di Manado Layak Dicontoh Daerah Lain

Ketua Komisi II DPR RI H. Zainudin Amali mengapresiasi penerapan konsep *Smart City* di Pemkot Manado bernama *Cerdas Command Center (C3)* Manado yang baru-baru ini diluncurkan.

“ Tim Kunker Komisi II DPR RI dipimpin H. Zainudin Amali didampingi Wali Kota Manado Vicky Lumentut berkesempatan meninjau *Cerdas Command Center (C3)* Manado di Gedung Serbaguna Pemkot Manado sehari pasca peluncurannya, Selasa (28/02).

"Saya apresiasi inisiatif Pemkot Manado yang mengadopsi konsep *Smart City* dari Bandung, Jakarta

dan Surabaya untuk diterapkan di sini dalam rangka melakukan pengawasan kota secara *real time*, efektif dan efisien," ungkap Amali.

Politisi senior partai Golkar ini juga memuji kehadiran C3 Manado sebagai pemanfaatan teknologi untuk memudahkan Pemkot dalam memonitor, mengkoordinasikan serta mengambil keputusan dan merespon permasalahan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi



Ketua Komisi II DPR RI H. Zainudin Amali memimpin Kuncker tinjau Smart City Manado

II DPR RI melihat langsung kecanggihan berbagai aplikasi yang terkoneksi dengan CCTV dan satelit untuk memantau kemacetan, jalan rusak, kebersihan kota, parkir liar, prakiraan cuaca, monitor harga sembako dan sebagainya.

"Tadi kita juga diperlihatkan salah satu aplikasi yang dapat memonitor wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga keberadaan mobil dinas Pemkot

lengkap dengan nomor polisinya, ini akan memudahkan sistem pengawasan internal Pemkot," ujar Amali memberi contoh. Politisi Dapil Jawa Timur XI ini mengharapkan agar konsep C3 Manado segera bisa terintegrasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memonitor sejauhmana kinerja aparat Pemkot dalam melayani masyarakat.

Kota Manado Vicky Lumentut

menjelaskan bahwa pengoperasian C3 Manado sebagai upaya Pemkot menuju Manado Kota Cerdas 2021. Ada 9 aplikasi antara lain : Sistem Gabungan Informasi Perangkat (Si Gita), Sistem Pemantauan Masyarakat (Si Tasya), *Elektronik Government Letter (e-Gol)*, Pantau Harga Pangan (Tau-Pang), Ramalan Iklim Cuaca Cerdas (RICCA), Radio Komunikasi Gagak, Qlue Manado, Lapor Manado dan Kanal Resmi Pemkot Manado. ■

(ojie.rmp) foto: Naeturgi/hr

Penempatan SDM Papua Dipilih dari *Extraordinary People*

Berbagai tantangan dan hambatan di Papua yang sangat indah, spektakuler dan *ordinary*, maka penempatan Sumber Daya Manusia di Papua pun harus dipilih dari orang-orang yang benar-benar *extraordinary*, staf-staf yang terbaik.



Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia

Hal tersebut diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat pertemuan tim dipimpin Wakil Ketua Komisi XI M. Prakosa dengan pemangku industri jasa keuangan di Papua.

"Berbagai hambatan di Papua yang sangat indah, spektakuler dan *ordinary* ini akan menjadi tantangan bagi kita semua khususnya bagi sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, penempatan SDM harus dipilih orang-orang yang benar-benar *extraordinary*," papar politisi PDI Perjuangan ini di Jayapura, Senin (27/02) malam.

Tempat yang begitu menantang seperti ini dan tantangan yang begitu tinggi, lanjut Indah, bila berhasil akan mendapatkan apresiasi yang sangat hebat. "Apresiasi yang tinggi kepada seluruh petugas yang dikirim, tenaga-tenaga *extraordinary*, personil yang cerdas dan siap bekerja keras di Papua," imbuh Indah.

Ia mengharapkan, SDM yang ditempatkan di Papua tersebut mampu transfer *knowledge* dan ikut membangun Papua yang lebih sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada Jamkrindo dan BPD Papua yang telah memberikan CSR nya kepada putra-putra daerah.

"Apresiasi kepada Jamkrindo dan BPD Papua semoga dilakukan secara konsisten dan konsekuen yang telah memberikan kesempatan pada putra-putra daerah dalam meningkatkan literasi keuangan yang diusahakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

"Semakin literasi tinggi semakin menimbulkan kontribusi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama pemangku sektor jasa keuangan di Papua menyampaikan berbagai tantangan dan hambatan industri keuangan di Papua antara lain hambatan geografis yang menyebabkan infrastruktur yang sulit dan jaringan komunikasi yang masih menjadi masalah sehingga membuat efisiensi dimana-mana, SDM yang rendah dan *generatio* di Papua yang tinggi. ■

(sc) foto : Suat/jk

Komisi V DPR RI Ingatkan Janji Presiden Target Pembangunan Akses Mandeh

Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan soal janji Presiden yang menargetkan pembangunan jalan akses menuju wisata Mandeh dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017. Namun hingga kini nampaknya pembangunan tersebut masih jalan di tempat. Alex pun akan membawa temuan ini dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR.

“ Ini sebuah kawasan wisata yg sangat indah. Sudah dibuka dengan pembangunan melalui APBD sejak 2012. Puncaknya sejak kunjungan Presiden Jokowi pada September tahun 2015. Dan menandatangani prasasti pembangunan wisata Mandeh ini. Instruksi beliau saat itu agar jalan akses ke Mandeh siap dalam dua tahun," demikian disampaikan Alex kepada Parlemen usai meninjau Puncak Mandeh pada Selasa, (28/02).

"Persoalannya sekarang adalah setelah satu tahun jalan akses dari Padang ke sini situasinya masih sama. Oleh karena itu Komisi V DPR RI menggagas kunjungan kerja dalam fungsi pengawasan menanyakan kenapa pembangunan jalan ke Mandeh seperti jalan di tempat," sambung Alex.

Politisi PDIP ini mengingatkan agar target Presiden Jokowi dapat direalisasikan pembangunannya pada akhir 2017. "Nah tadi kita dengar pemaparan bahwa ada masalah pembebasan lahan. Kita harapkan hasil kunker ini akan dibawa di rapat Komisi dengan Menteri PUPR agar dapat direalisasi," jelas Alex.

Dengan diselesaikan pembangunan akses jalan menuju Mandeh ini diharapkan mampu menarik para wisatawan. "Nah agar target presiden dapat direalisasi agar akhir 2017 ini akses ke Mandeh dapat dinikmati oleh wisatawan," tegasnya.

Mengenai pembebasan lahan yang menjadi persoalan, legislator dapil Sumatera Barat ini mengingatkan agar



Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman

Pemerintah Kabupaten juga turut aktif dalam proses pembebasan lahannya, agar mitra kerja Komisi V dapat menjalankan program kerjanya.

"Pembebasan lahan juga. Nah itu juga kita minta Pemkab berpartisipasi aktif agar mitra kerja kita dapat selesai segera mungkin target kinerjanya," tuturnya.

Pada bulan September 2015 lalu, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan akses menuju Mandeh dapat diselesaikan dalam dua tahun, namun hingga satu tahun lebih berjalan, situasinya masih belum banyak berubah. Komisi V pun meminta proses pembangunan dapat dipercepat. ■

(ns,mp), foto : hendra/jk

Komisi VIII DPR RI Dukung Riau Galakkan Bebas Asap Tahun 2017

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendukung program Pemerintah Provinsi Riau yang mencanangkan bebas bencana asap di sepanjang tahun 2017. Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tahunan di daerah tersebut telah diantisipasi oleh sejumlah daerah.



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI saat berdialog di kantor BPBB Riau

“ Kalau melihat kesiagaan mereka, kita berharap apa yang mereka canangkan tanpa asap itu bisa terlaksana dan kita harus terus memback-up mereka,” ujar Sodik di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Senin (27/02).

Menurut Sodik, banyaknya titik panas yang tersebar di beberapa wilayah di Riau menjadi salah satu penyebab kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi, prosedur perizinan terbang untuk melakukan pengontrolan dinilai cukup menyulitkan, khususnya izin melintas antar provinsi.

“Itu birokrasi standar, tetapi untuk hal ini harus diberikan dispensasi termasuk juga izin melintas antar provinsi, misalnya sudah masuk dari Riau. Namun, di perbatasan Sumatera Barat mereka terhenti,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia melanjutkan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi dengan melibatkan masyarakat setempat. Dengan begitu, keterlibatan masyarakat dapat membantu satgas untuk melakukan pencegahan dini.

“Bahkan mereka bisa menjadi kaki tangan kita untuk memberikan informasi. Mereka dilatih dan diperalati sehingga mereka bisa membantu memadamkan ketika ada gejala-gejala dini. Selama ini, sebagian ada yang acuh saja, sekarang kita akan tingkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini,” tandas politisi dari F-Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Riau Edward Sanger mengatakan Pemprov Riau telah menetapkan status Siaga Darurat pada 24 Januari hingga 30 April 2017. Penetapan

status tersebut untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga telah melakukan patroli terpadu dengan sejumlah pihak terkait. “Mudah-mudahan ini akan terus kita terapkan, baik di kabupaten kota maupun di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan,” ucap Edward.

Sebelumnya, BMKG memprediksi wilayah pesisir provinsi Riau telah memasuki musim kemarau sejak Februari 2017, dan akan terus berlanjut hingga pertengahan Maret mendatang.

Disela-sela kunjungan kerjanya, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau Bank Sampah Dallang *Collection* dan e-warung Kube Program Keluarga Harapan Kemensos. ■



Ketersediaan Beras di Tercukupi Hingga Bulan Puasa

Ketersediaan beras hingga Bulan Puasa di Babel Tercukupi, Namun Bulog diminta Tetap Berkoordinasi Dalam Pendistribusian

“Badan Urusan Logistik (Bulog) di Provinsi Bangka Belitung menyediakan 2700 ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan kedepan. Namun Bulog diminta tetap berkoordinasi dalam pendistribusian. Ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi Usai meninjau gudang Bulog di Bangka Belitung.

"Ini merupakan suatu hal baik, cadangan beras pemerintah memang sangat diperlukan dalam rangka ketersediaan keterjangkauan bahan pangan rakyat agar ada kewajiban pemerintah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat di Babel," kata Viva di Babel, Senin, (27/02).

Sehingga kata Viva, masyarakat tidak usah khawatir akan kebutuhan bahan pokok dalam menghadapi bulan Ramadhan nanti, sebab sudah dipastikan ketersediaannya."Kami



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meninjau gudang Bulog Babel

sudah melakukan pengawasan sejauh mana Bulog memberikan kepastian di dalam ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan, ini sudah cukup dan mudah-mudahan dapat memberikan rasa aman bagi rakyat," ujarnya.

Namun, pihaknya tetap meminta Bulog untuk berkoordinasi agar tidak ada permasalahan dalam pendistribusian bahan pokok tersebut.

Di tempat yang sama Kepala Perum Bulog Babel Bakhtiar menegaskan, masyarakat Babel tidak perlu khawatir mengenai bahan pokok hingga enam bulan kedepan. "Saat ini di gudang kita

ada stock 2700 untuk kebutuhan 5-6 bulan ke depan. Jadi masyarakat jangan khawatir di gudang ini ada beras, minyak dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada minyak goreng untuk menghadapi hari besar yang sebentar lagi akan datang," katanya.

Lebih lanjut Bakhtiar menjelaskan, untuk wilayah di Babel yang membutuhkan lebih banyak stok bahan pangan, pihaknya selalu memonitor setiap 3 bulan. "Daerah yang berpotensi banyak permintaan, kami (Bulog) selalu memonitor, sehingga tidak ada masalah dengan manajemen stok untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat tidak perlu khawatir," ujarnya. ■

fmmp/fole : Bahr



Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggenjot pembangunan infrastruktur guna meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut, diantaranya megaprojek jalan tol Kota Batulicin - Kota Banjarbaru sepanjang 145 km dan jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan sepanjang 6,5 km.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Lasarus dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Senin malam (27/02), menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat harus membantu pembangunan infrastruktur di Kalsel terutama pembangunan jalan tol dan jembatan di daerah tersebut.

"Pemerintah Pusat harus menganggarkan dalam APBN terkait megaprojek di Kalsel tersebut, saya optimis jika ada peluang pemerintah mengucurkan anggaran untuk kedua proyek tersebut," ungkap Lasarus. Lebih lanjut, Lasarus sampaikan bahwa kedua proyek tersebut sangat membantu dalam

mengembangkan laju pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan.

"Nanti DPR RI akan mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan bisa dibantu APBN, proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel butuh bantuan pemerintah pusat. Pemda Kalsel sudah mulai menjalankannya, tentunya pemerintah pusat juga harus turut serta mempercepat pembangunannya," ungkapnya.

Kalimantan Selatan sejatinya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum secara maksimal memberikan PAD Kalimantan Selatan yang tinggi. Hal ini karena infrastruktur di Kalsel belum memadai, seperti kondisi jalan yang rusak, pelabuhan yang sudah sempit serta infrastruktur penunjang laju perekonomian lainnya di Kalsel.

Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan rekomendasi kepada Pemda Kalsel diantaranya Komisi V mendorong agar megaprojek di Kalsel segera selesai, Komisi V juga meminta Pemda Kalsel segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Kalsel mendapatkan kucuran anggaran, bisa melalui APBN perubahan.

Selain itu, Lasarus juga meminta agar

Pemda Kalsel membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara kuat, agar megaprojek infrastruktur di Kalsel tidak memicu masalah dikemudian hari terutama masalah lingkungan.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan dalam paparannya dihadapan Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu telah mendanai tahap awal pembangunan jembatan Pulau Laut dari APBD sebesar Rp50 miliar. Adapun proyek tol batulicin - Kota Banjarbaru masih tahap pembebasan lahan.

"Kita berharap pemerintah pusat berkenan mengucurkan anggaran terkait dua proyek tersebut, selain itu kita berharap pemerintah pusat melihat komitmen pemerintah daerah atas kedua proyek tersebut," ungkap Wagub.

Rencana pembangunan jalan tol batulicin - banjarbaru - banjarasin akan menghubungkan dua kawasan strategis yaitu kawasan industri Batulicin dan kawasan Metropolitan Banjarbaru. Selain itu, pembangunan jalan tol ini akan memberi akses terhadap dua kawasan dengan potensi sumber daya alam yang besar yang sedang tumbuh pesat pada wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. ■

(skrimp) foto: singgih/jk

Komisi II DPR RI Kawal Laporan Update E-KTP

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke semua provinsi memiliki kesamaan misi, yakni untuk mengawal dan mendapatkan laporan ter *update* dari semua daerah, berkenaan dengan masalah E- KTP. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy saat berkunjung ke Lombok Barat, Provinsi NTB, Senin (27/02).



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy

“ Sekarang ini soal E-KTP sudah menjadi isu nasional, bukan saja kasus korupsinya, tetapi juga pada Pilkada 2017 yang lalu, kita menemukan banyak persoalan turunan dari E- KTP yang belum selesai,” ungkap Lukman.

Ia mengatakan, Kemendagri telah melaporkan kepada Komisi II DPR RI bahwa perekaman E- KTP tersebut telah mencapai 98 persen. Oleh karenanya Komisi II ingin mengecek apakah benar telah mencapai angka yang dilaporkan tersebut.

"Kita mendapat laporan juga dari Provinsi NTB bahwa proses perekamannya baru sekitar 70 persen, dan hal itu belum termasuk pencetakan," ucapnya.

Menghadapi tahun 2018, di Provinsi NTB akan ada 5 pilkada, dan pemilu pada tahun 2019. Bagi DPR RI penyempurnaan perekaman, cetakan, dan blanko- blanko, akan dikoneksikan dengan persoalan tahapan-tahapan pilkada, karena hal itu dirasa sangat penting.

"Kalau ini tidak selesai, maka kita menganggap pemerintah tidak siap. Dalam UU Pilkada disebutkan tentang batas akhir waktu rekaman, dan kita hanya memberikan ruang E- KTP dan surat keterangan kependudukan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jadi tidak ada lagi alasan apapun, hal itu harus ada solusinya," tandas Lukman. ■

(dep.mp) foto : Ryan/jk



Rapat Paripurna DPR RI Setujui Lima Anggota BSBI

Setelah mendengarkan usulan, masukan dan pendapat dari setiap utusan fraksi di DPR RI, Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat memutuskan untuk memilih lima calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2017-2020 untuk disahkan dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir telah melaporkan hasil pembahasan pencalonan Anggota BSBI periode 2017-2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/02).

"Kami mengharapkan agar Rapat Paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuan atas hasil pembahasan pencalonan Anggota BSBI periode 2017-2020 oleh Komisi XI DPR RI," papar Hafisz dalam sambutannya.

Selanjutnya Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menanyakan kepada para segenap Anggota Dewan, tanpa penolakan persetujuan pun diperoleh dari para wakil rakyat. Pembahasan pencalonan Anggota BSBI di Komisi XI berdasarkan persetujuan Rapat Bamus pada 1 Februari 2017.

Sesuai dengan Pasal 58A Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir

2009, bahwa dalam rangka membantu DPR RI melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk BSBI.

Keanggotaan BSBI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan sebelumnya mendapat persetujuan dari DPR RI. Keanggotaan SBSI berjumlah lima orang anggota, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota untuk masa jabatan tiga tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Dalam proses pembahasan di Komisi XI, secara musyawarah mufakat

memutuskan untuk memilih lima calon Anggota BSBI periode 2017-2020 untuk disahkan dalam Rapat Paripurna, yaitu: M. Fadhil Hasan,



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

Muhammad Edhi Purnawan, Chandra Fajri Ananda, A. Hikmahantojuwana, dan A. Tony Prasertiantono. ■

(eko/se)/foto:jaka/iv

Komisi VI DPR RI Temukan Penyelewengan Dana Subsidi Penggunaan Kapal Ternak Tol Laut

Komisi VI DPR RI menyangkan adanya penyelewengan peruntukan dana subsidi pengiriman Sapi dari Prov.NTT ke Jakarta dengan menggunakan Kapal Ternak Tol Laut KM Camara Nusantara 1.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan, Pemerintah telah mensubsidi biaya angkut 1,2 juta/ekor sapi, yang setiap keberangkatan membawa 500 ekor menggunakan Kapal Tol Laut.

Ia menambahkan, jadi untuk biaya angkut hanya membayar 330 ribu/ekor sapi. Sehingga, dengan subsidi ini, harga pengiriman jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan Cargo seharga 1,1 juta/ekor sapi.

"Dengan adanya Kapal Tol Laut yang bersubsidi ini, pihak swasta justru berebut untuk menggunakan jasa pengiriman ini, sebab bayarnya jauh lebih murah daripada menggunakan cargo," kata Ketua Tim Kunker Komisi VI saat meninjau Kapal Ternak di Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT, Selasa (28/2).

Padahal, lanjut Azam, PT Berdikari (persero) yang ditugaskan pemerintah untuk

memasok sapi dari NTT ke Jakarta. Tetapi, justru jumlah kuota pengiriman sapi yang didapat PT.Berdikari jauh lebih kecil dibanding swasta.

"Pada tahun 2016 saja hanya diberi kuota 1382 ekor selama 6 bulan, sedangkan menurut laporan pimpinan PT.Berdikari mampu memasok sekitar 6000 ekor/tahun, padahal Berdikari mendapat kuota 10 ribu/tahun dari DKI," jelas Politisi F-Demokrat ini.

Selain itu, kata Azam, ada ketimpangan harga jual sapi antara PT.Berdikari dengan pihak swasta. Padahal, harga beli dari petani cuma 30 ribu/kg, sedangkan dari pengepul 38-40 ribu/kg.

"Seandainya dijual 60-80 ribu saja, berarti sudah untung, tetapi pada kenyataannya pihak swasta menjual dengan harga 100-150 ribu/kg. Ini menjadi pertanyaan kami, siapa yang menikmati harga sapi semahal itu," tanya Politisi Dapil Jawa Timur 3 itu.

Sedangkan, Anggota Komisi VI DPR RI,

Bambang Haryo Soekartono menyatakan, Kapal Tol Laut yang disubsidi dari APBN 750 juta/kebarangkatan seharusnya PT. Berdikari sebagai stabilisator pasar bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak dari swasta.

"Menurut saya, karena fungsi PT.Berdikari sebagai stabilisator harga, dengan diberikan kuota yang lebih banyak harapannya harga sapi di Jakarta jadi lebih murah. Jika pihak swasta tidak bisa menjual dengan harga 80-85 ribu/kg sama dengan PT.Berdikari, lebih baik kuotanya diberikan saja semuanya ke Berdikari," tekan Politisi F-Gerindra ini.

Ditambahkannya, saat ini PT.Berdikari mendapatkan kuota sekitar 100-150 sapi setiap pengiriman dalam 1 bulan 2 kali, berarti tidak sampai 20 persen.

"Ini harus menjadi perhatian dari kementerian pertanian, perdagangan dan perhubungan untuk ikut mendukung didalam proses penambahan kuota dari PT.Berdikari dan soal penentuan harga. Karena subsidi ini dana rakyat, maka harusnya harga sapi bisa lebih murah," tutupnya.

Kepala Perwakilan Berdikari NTT, Jane marunduri mengatakan, pihaknya sering mendapatkan kendala mulai dari rekomendasi jumlah kuota, sampai sapi naik ke Kapal. Dengan kehadiran Komisi VI DPR RI ini, kendala operasional diharapkan bisa dikoordinasikan dengan pusat.

"Jadi nantinya, setiap pengurusan operasional dari mulai rekomendasi, karantina dan sampai naik kapal" ungkapny.

Menurut Jane, walaupun nantinya ada penambahan kuota untuk pengadaan sapi, kami dari pihak PT.Berdikari menyatakan siap untuk mensuplai sapi jika nantinya ada penambahan. ■



Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau Kapal Ternak Tol Laut di Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Dewan mengadakan pertemuan dengan BPK dan BPKP perwakilan Sumbar, dalam rangka meminta penjelasan tentang pelaksanaan penggunaan basis akrual di pemerintahan Daerah kota Pariaman

BK DPR RI Apresiasi Pemda Yang Terapkan SAP Berbasis Akrual

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar mengapresiasi positif peran BPK dan BPKP Perwakilan Sumbar yang telah memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

“ Kita mengharapkan BPKP dapat mempertahankan konsistensi dengan memberikan pendamping pemerintah daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual,” ujar Ketua Tim PKAKN kepada wartawan, baru-baru ini.

Dalam penjelasannya, BPK Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan bahwa Pemerintah kabupaten /kota se Sumatera Barat telah menyatakan kesiapan untuk penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD TA 2015. Hal ini dijelaskan berdasarkan prestasi opini WTP yang diraih oleh 12 kabupaten/kota untuk TA 2015.

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada LKPD di Kota Pariaman berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja semester II Tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat temuan positif antara lain; adanya komitmen pimpinan daerah melalui regulasi yang diciptakan dalam bentuk kebijakan akuntansi dalam Perwali dan adanya

dukungan anggaran dari DPR RI. Dalam penerapannya SAP berbasis akrual Kota Pariaman menggunakan aplikasi SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP. Sedangkan temuan negatifnya pada kesiapan SDM, terutama belum adanya analisis kompetensi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan fungsi pengelolaan keuangan, aset tetap, dan teknologi Informasi, serta inspektorat selaku *preview* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara dalam menerapkan implementasi SAP berbasis akrual di Sumatera Barat dan khususnya untuk Kota Pariaman, peran BPKP sebagai lembaga pendamping pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas melalui bimtek dan konsultasi penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD.

Bahkan BPKP Sumatera Barat dalam mengantisipasi perubahan kebijakan juga telah mengeluarkan aplikasi SIMDA baru versi terbaru. Pendapat BPKP untuk penerapan SAP

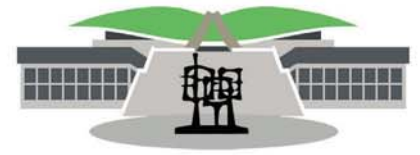


Kapus Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar, M.E., tukar menukar cendera mata dengan Kepala BPKP perwakilan Sumbar

berbasis akrual di Kota Pariaman, sudah berjalan dengan baik karena secara SDM sudah dipersiapkan dengan baik melalui bimtek. Dan pemda Pariaman sangat aktif melakukan konsultasi ke BPKP setiap ada permasalahan dalam implementasi SAP berbasis akrual pada pengelolaan keuangan daerahnya. ■ (s) foto: dok/mt



MAJALAH DAN BULETIN PARLEMENTARIA DPR RI



**KINI
HADIR!!!**

**DI BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA
DAN PELABUHAN INDONESIA SERTA
KAPAL KAPAL PELNI**

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS DPR RI di 08119443344



@dpr_ri



DPR RI



DPR RI



@DPR_RI